

Jurnalisme Kebencanaan Berbasis Advokasi dari Media Mainstream di Tengah Maraknya Penggunaan Media Sosial (Studi Kasus Pemberitaan Gempa Bumi Kabupaten Cianjur di Harian Umum *Pikiran Rakyat*)

Erwin Kustiman¹, Amin²

^{1,2}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia. [1erwinkustiman@unpas.ac.id](mailto:erwinkustiman@unpas.ac.id); [2amin@unpas.ac.id](mailto:amin@unpas.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to find out how the mainstream media (mainstream) in presenting journalism-standard news in reporting about earthquake natural disasters in Cianjur Regency, West Java Province. This is because the information that is widely consumed by the public actually comes from social media which is colored by the presence of hoaxes, misinformation, and disinformation. This study uses the case study method, through purposive sampling with the subject of this research is news about the earthquake natural disaster in Cianjur Regency, West Java Province which is present in the Bandung People's Daily Mind as a representation of the mainstream media. This research is expected to obtain a model of disaster journalism (disaster journalism model) from HU Thoughts of the People of Bandung regarding the earthquake natural disaster in Cianjur Regency.

Keywords: *Disaster Journalism, Mainstream Press Media, Social Media*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana media arus utama (mainstream) dalam menyajikan berita berstandar jurnalisme dalam pemberitaan tentang peristiwa bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengingat informasi yang banyak dikonsumsi masyarakat justru bersumber dari media sosial yang banyak diwarnai oleh hadirnya hoaks, misonformasi, dan disinformasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui *purposive sampling* dengan subjek penelitian ini adalah berita mengenai peristiwa bencana alam gempa bumi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang hadir di Harian Umum *Pikiran Rakyat* Bandung sebagai representasi media arus utama. Penelitian ini diharapkan mendapatkan model jurnalisme kebencanaan (*disaster journalism model*) dari HU *Pikiran Rakyat* Bandung tentang peristiwa bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci : Jurnalisme bencana, media pers, media sosial

PENDAHULUAN

Nilai berita (*news value*) merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Kriteria mengenai nilai berita merupakan patokan berarti bagi reporter. Dengan kriteria tersebut, seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang harus diliput dan dilaporkan, dan mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Akan tetapi, seiring disrupsi yang dialami oleh industri media (massa), terjadi pergeseran pola pemberitaan dari

yang semula berbasis jurnalisme standar kini cenderung mengikuti pola pemberitaan media sosial. Inilah yang disebut dengan jurnalisme umpan klik atau *click bait*.

Segera setelah tragedi bencana alam, internet digunakan secara besar-besaran oleh warga dunia maya untuk menyebarkan informasi tentang realitas situasi pasca fase gempa (Farinosi dan Micalizzi, 2012). Kita menyaksikan ledakan jurnalisme warga di berbagai platform online. Forum, blog, dan media sosial kebanjiran postingan, komentar, video dan gambar tentang kehidupan sehari-hari setelah bencana proses rekonstruksi kota dan kebutuhan untuk menghubungkan kembali secara online ikatan yang telah terputus oleh gempa.

Dalam sosiologi bencana, fokus pada praktik semacam ini merupakan bentuk pergeseran paradigma yang signifikan. Meskipun, selama bertahun-tahun, sosiolog telah menyelidiki pola adaptasi yang terjadi dalam komunitas yang mengalami trauma akibat peristiwa bencana, penelitian terkait analisis dinamika komunikasi sering ditinggalkan (lihat Fritz, 1961; Gilbert, 1998a; Kreps, 1998; Porfiriev, 1998; Quarantelli, 1998).

Ironisnya, banyak media massa mainstream, terutama portal online (daring), yang kemudian mengadopsi pola umpan balik ini. Hal ini dilakukan demi mengejar viralitas informasi yang artinya mendapat kucuran adsense dari platform global semacam google dan sejenisnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Jabar Saber Hoaks mengklarifikasi sedikitnya 59 aduan hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa Cianjur (jabarprov.go.id, 30 November 2022). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah mengatakan dari segi jumlah, dalam sepekan muncul 23 hoaks itu terbilang banyak. Hoaks tersebut dapat memperkeruh upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemda.

Media sosial atau medsos terbukti menjadi medium paling cepat mengabarkan peristiwa bencana alam tersebut masuk ke ruang publik bahkan yang paling domestik. Sayangnya, konten yang muncul tidak bisa dikatakan telah membuat publik tersadarkan akan makna penting di balik peristiwa bencana.

Kabar duka seringkali direspons dengan kurang baik oleh warganet maupun pengguna media sosial. Berdalih berbagi informasi, banyak konten tidak etis yang kemudian disebarkan lewat Facebook, Twitter maupun status Whatsapp. Konten konten sensitif SARA terus direproduksi baik sengaja atau tidak, ada agenda politis maupun ketidaktahuan semata. Banyak narasi yang kemudian menyesatkan publik (*misleading*) dan kembali menjebak kita pada hal sensitif dan kontraproduktif yang malah melemahkan simpul persatuan bangsa ini.

Pada akhirnya, memang, kehadiran media digital telah mengubah cara orang mencari dan mengonsumsi berita dan informasi, yang menantang jurnalisme profesional (Van der Meer, Verhoeven, Beentjes & Vligenthart, 2016). Kalimat “menantang jurnalisme profesional” patut kita garisbawahi karena kita menyimak, tak hanya warganet, sebagian media arus utama juga justru mengamplifikasi informasi niretika tersebut pada lamannya.

Kecenderungan ini berlangsung dikaitkan dengan semakin melemahnya industri pers kita akibat disrupsi. Konten berita yang “mengekor” viralitas di media sosial dipandang bisa mendatangkan pendapatan media dari adsense yang bersumber dari platform agregator selaras hal

yang sama dalam media sosial. Fenomena ini patut kita diskusikan terutama pada isu-isu penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dalam peristiwa katastrofik semestinya media arus utama tetap menjadi rujukan utama publik dalam mengambil tindakan. Bukan sebaliknya, ikut serta mereproduksi konten yang abai pada etika dan empati publik.

Liputan media tentang bencana alam (dan peristiwa besar pada umumnya) mendefinisikan dan membatasi wacana yang terkait dengan peristiwa tersebut. Bencana alam menghancurkan sumber daya modal sambil menurunkan layanan yang mereka berikan. Liputan media memberikan prioritas pada pemulihan berbagai bentuk modal – alam, manusia, sosial, dan bangunan (lihat Ekins, 2000 untuk definisi) – berdasarkan bias budaya, sosial, politik, dan teknis yang ada di semua media. Makalah ini berpendapat bahwa prioritas ini membentuk bagaimana publik memandang risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan bahwa persepsi ini akan memengaruhi serangkaian strategi untuk mitigasi kerentanan di masa depan yang dianggap wajar dan layak untuk dibelanjakan (misalnya pajak, biaya peluang). perubahan gaya hidup, dll).

Pada Buku *Jurnalisme, Berita Palsu, dan Disinformasi: Buku Pegangan untuk Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme* yang diterbitkan UNESCO dan bisa diakses terbuka (open source), jelas dinyatakan “berita” berarti informasi yang teruji dan berorientasi kepentingan umum, sehingga informasi yang tidak memenuhi standar tidak layak disebut berita. Berita palsu adalah sebuah lema oksimoron (mempertentangkan) yang merendahkan kredibilitas informasi yang memenuhi syarat verifikasi dan kepentingan umum, yaitu berita sejati. Mestinya kita menyebut hoaks dan sejenisnya sebagai “informasi palsu”, misinformasi, atau disinformasi saja.

Dalam buku ini, disinformasi dipakai untuk mengacu pada upaya sengaja (sering kali teratur) untuk membingungkan atau memanipulasi orang melalui pengiriman informasi bohong kepada mereka. Jadi, istilah “berita” seharusnya hanya mengacu pada informasi penting dan menarik tentang segala hal yang menyangkut kepentingan publik dan ditulis dengan mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme baku.

Untuk itu, penting untuk kembali menegaskan ihwal jurnalisme kebencanaan atau jurnalisme katastrofi ini. Benar bahwa saat ini media sosial tak mungkin bisa dinafikan sebagai platform penyampaian informasi secara masif dan interaktif. Akan tetapi, menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi -- bahkan secara sadar ikut mengamplifikasinya dalam laman media arus utama -- jelas langkah tidak bijak.

Jurnalisme kebencanaan tak sekadar melukiskan narasi kesedihan dari para korban atau mengurai hal-hal yang memantik “viralitas” semata. Jurnalisme katastrofi juga tidak hanya membahas soal dampak dan kronologis bencana. Informasi yang disampaikan juga harus mendidik masyarakat mengenai kejadian bencana. Hal ini bisa dilakukan lewat pemberitaan fakta bencana, agar dapat menjadi pembelajaran bagi pihak berwenang dan masyarakat di masa yang akan datang.

Tentu, dengan begitu, jurnalisme kebencanaan sangat memerlukan proses peliputan yang serius dan berbasiskan pemahaman mendalam jurnalisnya. Mereka juga harus memiliki kepekaan “humanisme sosial” yang terkait dengan aspek filosofisnya. Bencana adalah peristiwa kemanusiaan yang menyentuh banyak aspek. Menjadikan peristiwa bencana pada akhirnya

sekadar sebuah “komoditas pemberitaan” demi raihan adsense dan advertensi adalah tindakan yang tidak bisa diterima.

Jurnalisme bencana adalah proses mengumpulkan dan menyajikan berita dan informasi berkaitan dengan peristiwa alam dan ulah manusia yang telah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin terjadi di masa depan. Kebanyakan jurnalisme bencana berlangsung sebelum, selama, dan segera setelah insiden (Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012). Tugas jurnalisme bencana yang paling umum pada saat-saat seperti itu adalah memberikan peringatan dan untuk melaporkan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi.

Memberikan peringatan dan melaporkan perkembangan

Menyampaikan peringatan bencana (bila memungkinkan) mungkin merupakan cara yang 'paling jelas dan paling konsisten' dari peran jurnalis dan organisasi berita (Quarantelli, 1991, h. 23). Mereka dapat membantu menyampaikan informasi tersebut kepada individu dan masyarakat, yang dapat mencegah kerugian sebagai jurnalisme bencana orang dapat bersiap, mencari perlindungan, atau mengungsi (Perreault, Houston, dan Wilkins, 2014). Scanlon (2006, hlm. 413) mencatat bahwa 'media mungkin penting untuk peringatan yang efektif'. Wartawan dan organisasi berita juga melaporkan bencana, seringkali sebagai terobosan berita (Sung, 2014).

Steffens (2012, hlm. 7) berpendapat bahwa berita bencana 'adalah definisi berita yang paling murni—segera, tidak biasa, dan penuh dengan emosi'. Pelaporan bencana dapat mencakup dasar-dasar jurnalistik, seperti mencari tahu tentang peristiwa, melaporkan apa yang dipelajari, mengirim jurnalis ke tempat kejadian, memberikan informasi latar belakang, memverifikasi informasi, mengoreksi rumor atau laporan yang salah, dan bekerja untuk mengumpulkan bahan tambahan (Scanlon, 2006, 2007).

Organisasi berita mungkin merespons secara 'besar-besaran' terhadap kejadian bencana besar, yang mengakibatkan banyak (atau semua) anggota operasi berita yang digunakan untuk pekerjaan tersebut (Scanlon, 2007, p. 78). Melaporkan bencana yang menimpa masyarakat juga dapat dikonseptualisasikan sebagai proses 'menyaksikan' atau 'bersaksi' atas peristiwa tersebut (Cottle, 2013).

Cakupan bencana seringkali membantu menghasilkan 'kesadaran situasional' bagi publik dan pejabat pemerintah, yang dapat memandu tindakan individu dan kelembagaan dan tanggapan. Sementara bencana dapat mempengaruhi sejumlah besar orang secara langsung, banyak hal yang diketahui tentang bencana secara umum adalah karena liputan media, bukan pengalaman langsung (Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012; Pantti, Wahl-Jorgensen, dan Cottle, 2012).

Secara keseluruhan, jurnalisme bencana 'memainkan peran layanan publik yang penting' karena dapat membantu orang untuk memahami dan mengatasi peristiwa yang penuh tekanan dan berbahaya (Thorson, 2012, hlm. 74). Rekomendasi tersedia tentang bagaimana wartawan harus melaporkan bencana. Disarankan, misalnya, jurnalis memberikan liputan yang cepat, akurat, dan jelas (Dill dan Wu, 2009; Steffens et al., 2012). Selain itu, mereka harus berempati kepada orang-orang yang terkena dampak dan menyampaikan dengan hormat (Salwen, 1995; Kay et al., 2010). Jika individu atau komunitas berada dalam bahaya karena bencana, jurnalis dapat melaporkan

dengan emosi lebih dari biasanya dan lebih terlibat dalam situasi itu dari yang khas (Usher, 2009). Selain memberikan peringatan dan melaporkan proses, jurnalis juga bisa terlibat dalam memeriksa mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, memfasilitasi pemulihan jangka panjang, dan mendorong ketahanan antara individu dan masyarakat.

Keterlibatan dalam mitigasi bencana, kesiapsiagaan, pemulihan, dan ketahanan

Liputan media tentang bencana sering menarik perhatian publik yang signifikan (Robinson, 2007; Pew Research Center, 2010). Organisasi berita melaporkan secara ekstensif insiden besar, tetapi biasanya liputannya berumur pendek dibandingkan dengan masalah atau isu pemberitaan yang lain (Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012). Di luar fokus pada berita terbaru, jurnalis bencana dapat mengembangkan konten yang dapat mendorong mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, pemulihan jangka panjang, dan ketahanan di antara individu, keluarga, dan komunitas.

Mitigasi dan kesiapsiagaan mencakup tindakan yang dapat mencegah terjadinya bencana atau mengurangi cedera atau kerugian. Untuk seorang individu, ini mungkin melibatkan perakitan kit bencana rumah; bagi masyarakat, hal itu mungkin memerlukan pengembangan pengendalian banjir yang efektif dan mengidentifikasi rute evakuasi dengan jelas.

Wartawan dan organisasi berita bisa memeriksa masalah mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pelaporan bencana mereka. Secara khusus, risiko bencana dapat dinilai dan diidentifikasi dalam liputan berita (Burns dan Eltham, 2010; Panti, Wahl-Jorgensen, dan Cottle, 2012), dan jurnalis dapat menjelaskan langkah-langkah individu dan komunitas dapat mengambil untuk mengurangi efek mereka dan untuk mempersiapkan diri mereka (Perez-Lugo, 2004; Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012; Houston et al., 2015b).

Jurnalis juga dapat mengadvokasi tindakan atau kebijakan yang dapat mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, atau mengurangi dampak dengan bertindak sebagai 'mitigasi pengawas' (Wilkins, 2014, hlm. 6). Setelah bencana, wawasan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terjadi atau untuk mengurangi konsekuensinya dengan menginformasikan upaya kesiapsiagaan di masa depan. Wartawan dapat menginvestigasi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan lewat upaya menghubungkan kejadian dengan manajer kedaruratan dan ahli lainnya (McLean dan Power, 2013) dan dengan berpartisipasi dalam perencanaan dengan lembaga pemerintah dan masyarakat (Lowrey et al., 2007).

Wartawan dan organisasi berita, khususnya yang berada di daerah yang terkena dampak bencana, juga dapat mengeksplorasi efek jangka panjang dari suatu peristiwa, proses pemulihan yang sesuai, dan ketahanan masyarakat. Melaporkan pemulihan jangka panjang mungkin termasuk menginformasikan masyarakat tentang layanan pascabencana dan memfasilitasi cakupan perencanaan masyarakat dan pembangunan kembali pascabencana (Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012).

Konsep resiliensi mengacu pada kapasitas untuk 'memantul ke depan' mengikuti bencana (Houston, 2015, p. 176), dan dapat berlaku untuk individu dan komunitas. Jurnalis dapat berkontribusi untuk membina ketahanan masyarakat dengan menciptakan narasi masyarakat,

memfasilitasi ingatan kolektif dan pemulihan masyarakat, mempromosikan kesadaran ketahanan masyarakat, dan menyelidiki kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang cenderung mengurangi ketahanan (Usher, 2009; Houston, Pfefferbaum, dan Rosenholtz, 2012; Newman dan Shapiro, 2014; Houston et al., 2015b).

Ulasan ini menggambarkan bahwa ada potensi yang signifikan bagi jurnalis dan organisasi berita untuk memiliki dampak positif pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Namun, sedikit yang diketahui tentang apa dan bagaimana jurnalis mempertimbangkan tambahan peran ini (memeriksa mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, memfasilitasi pemulihan jangka panjang, dan membina ketahanan) ketika mereka melaporkan suatu peristiwa. Akibatnya, untuk memahami bagaimana pendekatan teoretis yang dijelaskan sebelumnya terhadap jurnalisme bencana sesuai dengan pendekatan praktis untuk melaporkan peristiwa, tim peneliti mewawancarai sekelompok wartawan berpengalaman. Wawancara dianalisis untuk menentukan bagaimana wartawan memikirkan peran yang berbeda ketika meliput bencana.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pemetaan pemberitaan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur oleh Harian Umum Pikiran Rakyat melalui kegiatan jurnalisme bencana, kebijakan redaksional dan manajemen keredaksian Harian Umum dalam pemberitaan bencana, target pemberitaan peristiwa bencana, dan model jurnalisme kebencanaan di Harian Umum Pikiran Rakyat.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Creswell dalam Patilima (2005) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang di bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus (case study). Studi kasus adalah penelitian yang terkait dengan penyelidikan intensif dari fenomena tertentu dalam konteks yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sampel berdasarkan tujuan). *Purposive sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan kriteria atau tujuan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi literatur. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada hasil wawancara mendalam kepada para narasumber dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik penyampaian informasi kebencanaan antara media sosial dengan media mainstream. Dari aspek pemberitaan Pemberitaan di media mainstream dan di media sosial memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa aspek. Berikut ini adalah perbandingan beberapa perbedaan utama antara cara pemberitaan di media mainstream dan di media sosial:

Media mainstream cenderung mengandalkan jaringan reporter, wartawan, dan sumber-sumber resmi untuk mengumpulkan informasi. Mereka melakukan investigasi, wawancara, dan penelitian yang mendalam sebelum menyampaikan berita kepada publik.

Pemimpin Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat Satrya Graha dalam penuturannya meengaskan:

"Informasi di media sosial hanya kami jadikan sebagai sumber awal penelusuran kejadian. Kami tidak pernah mengutip teks dari media sosial dalam pemberitaan. Termasuk pada kejadian bencana alam di Kabupaten Cianjur. Informasi awal kami dapatkan dari Twitter dan Facebook dari netizen. Akan tetapi, setelah itu kami melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan penelusuran lebih jauh melalui reporter kami di Cianjur maupun di pusat pemerintahan lainnya."

Sementara itu media sosial memungkinkan siapa saja untuk menjadi sumber informasi. Informasi yang disampaikan di media sosial dapat berasal dari individu, pengguna biasa, atau sumber yang tidak diverifikasi secara resmi. Informasi juga dapat tersebar secara viral tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini selaras dengan pernyataan dari narasumber lainnya yakni Novianti Nurulliah (wartawan HU Pikiran Rakyat) bahwa:

"Sangat berbahaya bagi saya sebagai wartawan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya rujukan pemberitaan. Untuk memastikan autentisitas informasi dan kebenaran di dalamnya, maka saya harus mendapatkan informasi langsung dari pihak pertama melalui proses wawancara."

Media mainstream cenderung memiliki proses produksi yang lebih lama, karena melibatkan proses penyuntingan, verifikasi, dan pengawasan yang ketat sebelum berita dipublikasikan. Informasi baru dapat membutuhkan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama sebelum sampai kepada publik. Sedangkan media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara instan. Berita dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai platform sosial, seperti Twitter, Facebook, atau WhatsApp. Informasi dapat mencapai publik dalam hitungan detik, terlepas dari kebenaran atau keakuratannya.

Media mainstream biasanya memiliki reputasi dan tanggung jawab untuk menyampaikan berita yang akurat dan diverifikasi. Mereka melakukan pengecekan fakta, memverifikasi sumber, dan mencoba menghindari bias dalam pemberitaan mereka. Meskipun tidak sempurna, media mainstream lebih cenderung berpegang pada standar jurnalisme yang diakui.

Media sosial sering kali tidak memiliki mekanisme formal untuk memverifikasi kebenaran informasi. Informasi yang tersebar di media sosial dapat menjadi subjek hoaks, kabar tidak benar, atau bahkan disengaja untuk memanipulasi opini publik. Kredibilitas informasi di media sosial sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh bias pribadi atau kelompok.

Hal yang paling membedakan adalah media mainstream beroperasi dalam kerangka hukum dan etika yang ketat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi individu, menghindari pencemaran nama baik, dan mematuhi kode etik jurnalistik. Media mainstream juga rentan terhadap tanggung jawab hukum jika melanggar standar etika atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

“Kami harus sangat memperhatikan aspek etika jurnalistik dalam pemberitaan media kami. Tidak semua informasi dapat kami muat dan dipublikasikan sehingga sering terkesan media mainstream ketinggalan dari media sosial. Kami harus melakukan proses ‘news judgement’ sebelum setiap informasi dan berita kami sampaikan kepada khalayak.” (Satrya Graha, Pemimpin Redaksi HU Pikiran Rakyat).

Di sisi lain, media sosial umumnya memiliki sedikit kontrol terhadap konten yang dipublikasikan oleh pengguna. Meskipun ada upaya untuk memoderasi konten yang melanggar aturan tertentu, hal ini sering kali tidak cukup efektif. Etika individu dalam penggunaan media sosial bervariasi dan tidak diatur secara konsisten.

Hasil riset menunjukkan bahwa media mainstream masih memiliki peran penting dalam kebencanaan, meskipun media sosial semakin populer. Media mainstream seringkali memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya dan jaringan informasi yang dapat digunakan untuk memberikan laporan yang akurat dan mendalam tentang kebencanaan. Namun, kehadiran media sosial telah mengubah lanskap informasi kebencanaan dengan memberikan platform bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian informasi.

Sebagaimana ditekankan Aaron Clark-Ginsberg (2010), ketika menghadapi maraknya penggunaan media sosial, media mainstream perlu mengadopsi pendekatan berbasis advokasi untuk menguatkan perannya. Pendekatan ini melibatkan melampaui laporan berita tradisional dengan mengintegrasikan elemen advokasi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks kebencanaan, advokasi dapat melibatkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, mempromosikan upaya mitigasi, dan memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik terkait kebencanaan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara media mainstream dan media sosial. Media mainstream dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan dampak informasi mereka. Sebaliknya, media sosial dapat mengambil manfaat dari keakuratan dan keberlanjutan berita yang dihasilkan oleh media mainstream. Kolaborasi yang kuat antara keduanya dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih baik dalam menghadapi kebencanaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media mainstream masih memiliki peran yang signifikan dalam jurnalisme kebencanaan, meskipun media sosial semakin dominan. Melalui pendekatan berbasis advokasi dan kolaborasi dengan media sosial, media mainstream dapat memperkuat peran mereka dalam menyampaikan informasi kebencanaan yang akurat, berdampak, dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Kebijakan Redaksi dalam Pemberitaan Bencana Alam

Harian Umum *Pikiran Rakyat*, dalam pemberitaan tentang bencana alam di provinsi Cianjur, rata-rata menyajikan berita terkini. Menariknya, ada konteks ruang sosial yang tidak lagi sekadar dimensi penangkapan topik. Media arus utama juga berusaha menyebarkan isu tersebut dan berinisiatif mencari solusi atas permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi, dalam hal ini bencana alam di Kabupaten Cianjur.

Namun dalam praktiknya, pengembangan kebijakan redaksi yang formal, komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah bencana alam khususnya tentang gempa bumi, belum mencapai intensitas perhatian. Kepentingan berbagai pihak tidak diperhatikan dengan baik. Media terus mengikuti perkembangan isu ini. Mereka yang mengikutinya, melalui berbagai kebijakan yang pro publik, tidak memaksakan isu banjir menjadi perhatian, visi dan amanat yang terkait langsung, misalnya pengelolaan lingkungan secara komprehensif.

Dalam hal meliput bencana alam, *HU Pikiran Rakyat* sangat bergantung pada tanda-tanda keterlibatan dan gerakan jurnalistik di area ini.. Ketika jurnalis menemukan topik penting dan menganggapnya menarik, media memiliki lebih banyak energi untuk meliputnya.

Harian Umum *Pikiran Rakyat* memosisikan dirinya lebih preskriptif sebagai wahana penyampaian informasi, menyerahkan evaluasi dan tindak lanjutnya kepada aparat pengambil kebijakan. Karakter preskriptif yang diperlihatkan dalam pemberitaan "PR" merupakan perpanjangan dari kebijakan redaksional. Manajemen memiliki tim redaksi yang membahas isu-isu publik dengan berbagai informan. Berbagai pihak diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan konteks dan ruang kepentingan masing-masing.

Berbagai kepentingan mereka, baik publik maupun pribadi, masih bisa diperdebatkan. "PR" disini berfungsi untuk memediasi kebutuhan informasi dan kepentingan masyarakat luas. Pelaporan "PR" mengacu pada komunikasi informasi tentang lingkungan kepada publik untuk menjadi bahan debat publik, dan juga berfungsi sebagai pendorong tindakan publik ketika keputusan dibuat tentang masalah lingkungan dan bencana alam. .

Model Jurnalisme Kebencanaan Media Mainstream

Kesimpulan penting yang dalam dirumuskan dalam penelitian ini adalah bahwa media mainstream dan media sosial memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemberitaan. Meskipun media sosial memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan penyebaran berita yang lebih cepat, media mainstream tetap memiliki peran penting dalam memverifikasi informasi, menjaga standar jurnalisme, dan menyediakan berita yang diverifikasi dan akurat kepada publik.

Penelitian juga menunjukkan bahwa media mainstream masih memiliki peran penting dalam kebencanaan, meskipun media sosial semakin populer. Media mainstream seringkali memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya dan jaringan informasi yang dapat digunakan untuk memberikan laporan yang akurat dan mendalam tentang kebencanaan. Namun, kehadiran media sosial telah mengubah lanskap informasi kebencanaan dengan memberikan platform bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian informasi.

Hanya saja dalam merumuskan model jurnalisme kebencanaan ke depan dalam situasi maraknya penggunaan media sosial, media mainstream perlu mengadopsi pendekatan berbasis advokasi untuk menguatkan perannya. Pendekatan ini melibatkan melampaui laporan berita tradisional dengan mengintegrasikan elemen advokasi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks peristiwa atau isu kebencanaan, advokasi dapat melibatkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, mempromosikan upaya mitigasi, dan memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik terkait kebencanaan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara media mainstream dan media sosial. Media mainstream dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan dampak informasi mereka. Sebaliknya, media sosial dapat mengambil manfaat dari keakuratan dan keberlanjutan berita yang dihasilkan oleh media mainstream. Kolaborasi yang kuat antara keduanya dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih baik dalam menghadapi kebencanaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa media mainstream masih memiliki peran yang signifikan dalam jurnalisme kebencanaan, meskipun media sosial semakin dominan. Melalui pendekatan berbasis advokasi dan kolaborasi dengan media sosial, media mainstream dapat memperkuat peran mereka dalam menyampaikan informasi kebencanaan yang akurat, berdampak, dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media mainstream membutuhkan pendekatan yang beradaptasi dengan era media sosial untuk mempertahankan relevansi dan efektivitasnya dalam jurnalisme kebencanaan.

SIMPULAN

Media mainstream dan media sosial memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemberitaan termasuk dalam konteks peristiwa bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Meskipun media sosial memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan penyebaran berita yang lebih cepat, media mainstream tetap memiliki peran penting dalam memverifikasi informasi, menjaga standar jurnalisme, dan menyediakan berita yang diverifikasi dan akurat kepada publik.

Media mainstream masih memiliki peran penting dalam kebencanaan, meskipun media sosial semakin populer. Media mainstream seringkali memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya dan jaringan informasi yang dapat digunakan untuk memberikan laporan yang akurat dan mendalam tentang kebencanaan. Namun, kehadiran media sosial telah mengubah lanskap informasi kebencanaan dengan memberikan platform bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian informasi.

Hanya saja dalam merumuskan model jurnalisme kebencanaan ke depan dalam situasi maraknya penggunaan media sosial, media mainstream perlu mengadopsi pendekatan berbasis advokasi untuk menguatkan perannya. Pendekatan ini melibatkan melampaui laporan berita tradisional dengan mengintegrasikan elemen advokasi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks peristiwa atau isu kebencanaan, advokasi dapat melibatkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, mempromosikan upaya mitigasi, dan memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik terkait kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ahmad. (2010). *Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme*. Jakarta: KPG
- Arif, Ahmad (2011). *Jurnalisme Bencana : Tugas Suci, Praktik Cemar*, dalam Budi, Setio [ed] (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta :Aspikom
- Badri, M (2011). *Paradigma Jurnalisme Bencana*, dalam Budi, Setio [ed] *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta :Aspikom dan Buku Litera
- Beaton, R. et al. (2009) ‘*The role of public health in disaster mental health and behavioral health in children and families*’. *Journal of Public Health Management and Practice*. 15(6). hlm. E1–E11.
- Burns, A. and B. Eltham (2010) “‘*Catastrophic failure*’ theories and disaster journalism: evaluating media explanations of the Black Saturday bushfires’. *Media International Australia*. 137(1). hlm. 90–99.
- Cottle, S. (2013) ‘*Journalists witnessing disaster*’. *Journalism Studies*. 14(2).hlm. 232–248.
- Dill, R.K. and H.D. Wu (2009) ‘*Coverage of Katrina in local, regional, national newspapers*’. *Newspaper Research Journal*. 30(1). hlm. 6–20.
- Fajar Junaedi & Filosa Gita Sukmono. *Jurnalisme Sensitif Bencana...* 721
- H.B. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press. Hessel
- Nogi .S T. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Junaedi, Fajar dan Filosa Gita Sukmono. (2017). *Jurnalisme Sensitif Bencana, Panduan Peliputan Bencana*. Yogyakarta, Buku Litera
- Heider, D., M. McCombs, and P.M. Poindexter (2005) ‘*What the public expects of local news: views on public and traditional journalism*’. *Journalism and Mass Communication Quarterly*. 82(4). hlm. 952–967.
- Houston, J.B. (2012) ‘*Public disaster mental/behavioral health communication: intervention across disaster phases*’. *Journal of Emergency Management*. 10(4). hlm. 283–292.
- Lestari, Puji; et. all. *Environmental Communication Model for Disaster Mitigation of Mount Sinabung Eruption, Karo Regency of North Sumatera*, *Journal Information*, Volume 19, Number 9 (B) pp 4265-4270, ISSN 1343-4500, eISSN 1344-8994, C2016. Tokyo: International Information Institute
- Nugroho, Asef Dwi; Yanuarianto, Tri; dan Awalia Noor. (2011). *Wajah Semu Komunikasi Bencana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Lingkar Media. Hlm. 85 – 102.
- Sellnow, Timothy L. dan Seeger, Matthew W. (2013). *Theorizing Crisis Communication*. Chichester: John Wiley & Sons, Inc. Hlm 140 – 142.
- Sobur, Alex. (2008). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suhandang, Kustadi. (2010). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa